



Scripta Technica: Journal of Engineering and Applied Technology

Vol 1 No 2 Desember 2025, Hal. 1-10
ISSN: 3110-0775 (Print) ISSN: 3109-9696 (Electronic)
Open Access: <https://scriptainteletal.com/scripta-technica>

Peran Pemda dalam Peningkatan Konektivitas Transportasi Udara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Muhamad Rajulan^{1*}, Maudhy Satyadharma², Hado³

¹⁻² Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

³ Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

email: muhamadrajulan@yahoo.com

Article Info :

Received:

10-8-2025

Revised:

12-9-2025

Accepted:

05-10-2025

Abstract

Air transportation is an important element in supporting regional development, especially in archipelagic areas such as Southeast Sulawesi Province. This study aims to analyze the role of local government in improving air transportation connectivity in the region. The method used is a qualitative approach with purposive sampling techniques of informants who understand air transportation management policies and practices. Data were obtained through interviews, observations, and document reviews during August–November 2024. The results show that the Southeast Sulawesi Regional Government plays a significant role in supporting air transportation connectivity through four main functions, namely as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. As a regulator, the local government establishes policies and provides support for land acquisition; as a dynamizer, it encourages collaboration with the private sector; as a facilitator, it bridges cooperation between regions and airlines; and as a catalyst, it accelerates infrastructure development and creates a conducive investment climate. These roles have proven to have a positive impact on increasing mobility, economic growth, and the development of the tourism sector in Southeast Sulawesi. Strengthened collaboration among stakeholders is needed so that air connectivity can function optimally.

Keywords: Government, Connectivity, Transportation, Development, Collaboration.

Abstrak

Transportasi udara merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan wilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan konektivitas transportasi udara di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap informan yang memahami kebijakan dan praktik pengelolaan transportasi udara. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen selama Agustus–November 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara berperan signifikan dalam mendukung konektivitas transportasi udara melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, Pemda menetapkan kebijakan dan memberikan dukungan pembebasan lahan; sebagai dinamisator, mendorong kolaborasi dengan pihak swasta; sebagai fasilitator, menjembatani kerja sama antardaerah dan maskapai penerbangan; serta sebagai katalisator, mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peran tersebut terbukti berdampak positif terhadap peningkatan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara. Diperlukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar konektivitas udara dapat berfungsi optimal.

Kata kunci: Pemerintah, Konektivitas, Transportasi, Pembangunan, Kolaborasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Infrastruktur sangat berperan dalam mendorong percepatan pembangunan (Baidarus et al., 2018). Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai/laut dan transportasi udara. Pengembangan infrastruktur transportasi perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berdampak dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau publik (Hasina & Satyadharma, 2023).

Transportasi merupakan kekuatan untuk menunjukkan wajah dan perkembangan dari suatu daerah tersebut dalam jangka panjang (Adisasmita, 2012; Jinca, 2009; Sani, 2010). Salah satu moda

transportasi yang penting dalam mendorong pembangunan nasional adalah transportasi udara. Transportasi udara hari ini merupakan bagian dari sistem transportasi yang saat ini menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan karena waktu tempuh moda transportasi udara yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lain (Arsyad, 2021)

Eksistensi sebuah Bandara dalam suatu daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi telah mengalami pengkajian yang matang dari berbagai aspeknya, baik dari unsur tata ruangnya maupun jenis (UU No. 1 Tahun 2009; Amsyal, 2024). Konektivitas transportasi udara merujuk pada kemampuan untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain melalui jalur penerbangan yang efisien dan dapat diakses oleh berbagai pihak. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, transportasi udara memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat pergerakan orang, barang, dan informasi. Konektivitas yang baik melalui transportasi udara tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan budaya antar wilayah. Hal itu bisa dilihat dari adanya peningkatan perdagangan, kemudahan akses ke global, mendorong peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu dengan adanya konektivitas transportasi udara menjadi sarana dan fasilitator dalam pertukaran budaya, mendorong peningkatan jalinan sosial, mendukung kolaborasi antar wilayah serta tentu dapat mempercepat penyebaran informasi, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, teknologi, atau informasi sosial yang penting. Ini meningkatkan kesadaran sosial antar wilayah dan membantu dalam penyelesaian masalah sosial yang mungkin terjadi (Wahyuni, 2018).

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, pengembangan konektivitas transportasi udara menjadi semakin krusial seiring dengan kebutuhan untuk mempercepat distribusi barang, meningkatkan aksesibilitas antar daerah, serta mendukung sektor pariwisata yang terus berkembang. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 kabupaten/kota serta terdiri dari beberapa wilayah kepulauan sangat membutuhkan kehadiran sarana dan prasarana transportasi termasuk sarana prasarana Bandar Udara (bandara) baik dalam rangka memenuhi mobilitas pergerakan orang dan barang masuk dan keluar Provinsi Sulawesi Tenggara namun juga dapat berdampak pada meningkatnya investasi ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu juga sejalan dengan temuan yang diteliti oleh (Jusman et al., 2024) yang menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang dapat lebih optimal jika didukung oleh sistem transportasi yang efisien, salah satunya melalui transportasi udara. Dengan adanya transportasi udara yang memadai, kegiatan ekonomi seperti perdagangan antar wilayah dapat berjalan lebih lancar, dan akses ke pusat-pusat ekonomi lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional, dapat meningkat.

Sekalipun demikian dari beberapa literatur yang ditemui menunjukkan masih banyaknya Bandar udara di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami berbagai kendala dan tantangan dalam optimalisasi fungsi maupun operasional pelayanannya. Menurut Fatih dalam Wahyuni (2018), pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan hukum serta perundang-undangan di wilayah tertentu. Hal itu juga dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Dalam konteks peran pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, terdapat beberapa peran yang dijelaskan oleh Karmila et al., (2019), Firdaus (2020), antara lain (1) Peran Pemerintah sebagai Regulator: Pemerintah daerah bertindak sebagai pengatur dan penyusun kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah menerbitkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan tertib administrasi dalam proses pembangunan. (2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator: Sebagai dinamisator, pemerintah daerah menggerakkan partisipasi dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, dunia usaha, maupun instansi terkait lainnya. Pemerintah berperan dalam mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, agar berjalan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang aktif antara berbagai pihak. (3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator: Dalam peran ini, pemerintah daerah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah bertugas sebagai pen jembatan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam

pembangunan, sehingga dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada untuk mendukung kemajuan daerah. (4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator: Sebagai katalisator, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah. Pemerintah daerah juga berperan dalam menciptakan model sosial untuk pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara cepat dan berkelanjutan.

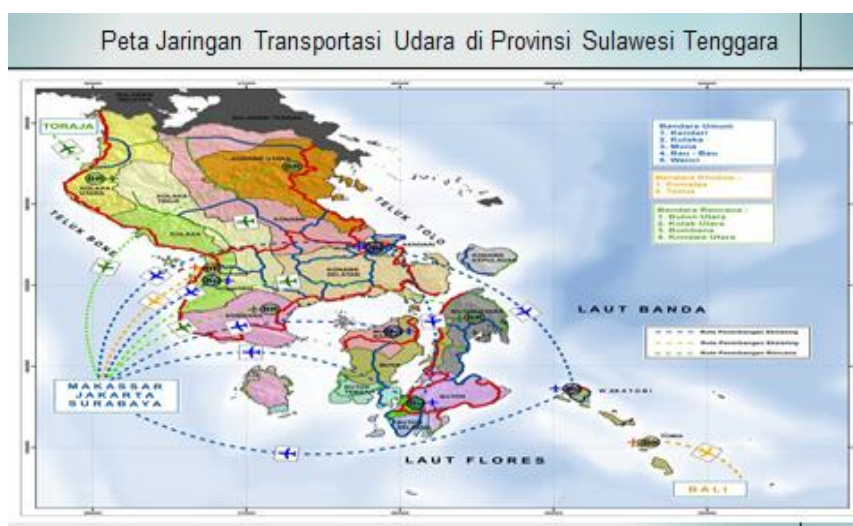
Dengan melaksanakan peran-peran ini, pemerintah daerah dapat mendorong kemajuan pembangunan yang merata dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu menimbulkan dorongan bagi peneliti untuk mengkaitkan dengan peran Pemerintah Daerah khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengembangkan dan meningkatkan konektivitas transportasi udara sangat penting. PEMDA perlu memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang mendukung transportasi udara, menciptakan kebijakan yang menarik maskapai penerbangan, serta memberikan insentif dan dukungan yang diperlukan agar konektivitas antar daerah dapat terwujud dengan baik. Diharapkan dengan adanya peningkatan konektivitas transportasi udara, diharapkan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan pariwisata yang ada dengan lebih maksimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh provinsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana dinyatakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah mengenai program data/atau pengalaman yang dialami oleh peneliti. Penelitian ini telah dilaksanakan pada beberapa Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai fokus penelitian dari Bulan Agustus–November 2024. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta telaah dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah terkait sektor transportasi udara. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak awal pengumpulan hingga tahap interpretasi hasil, dengan langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran mengenai bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan infrastruktur transportasi udara di Sulawesi Tenggara dijalankan serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung konektivitas dan pembangunan wilayah (Nadimi, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 Kabupaten Kota memiliki berbagai Bandar udara yang diperlihatkan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Peta Jaringan Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi pergerakan penumpang yang cenderung baik dan sebenarnya sangat mendukung pengembangan ekonomi wilayah yang ada, yang akan diuraikan pada beberapa tabel berikut:

Tabel 1. Data Pergerakan Penumpang dan Pesawat di Bandara Halu Oleo

Tahun	Lalu Lintas Pesawat Udara		Lalu Lintas Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2016	4945	4953	617,161	635,558
2017	6044	6043	709,845	744,432
2018	6069	6059	783,028	786,981
2019	4905	4904	618,759	622,045
2020	3280	3270	324,550	327,126
2021	3193	3098	284,688	281,143
2022	5715	5712	562,379	572,680
2023	4172	4172	546,379	544,418

Sumber: BPS Prov Sultra (2024)

Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota memiliki sejumlah bandar udara yang tersebar di berbagai wilayah, sebagaimana tergambar pada peta jaringan bandar udara. Berdasarkan Tabel 1, pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Halu Oleo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019, yang menandakan adanya pertumbuhan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penumpang dan lalu lintas pesawat terjadi pada periode 2020 hingga 2023 akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi sektor transportasi udara secara nasional.

Hasil observasi dan wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa Bandara Halu Oleo memiliki rencana pengembangan strategis untuk memperkuat fungsinya sebagai pusat konektivitas udara di Sulawesi Tenggara. Rencana utama yang sedang dikaji adalah peningkatan panjang landasan pacu menjadi 3.100 meter agar bandara dapat beroperasi sebagai Bandara Internasional. Pengembangan ini juga mencakup penetapan Bandara Halu Oleo sebagai embarkasi haji, yang diperkirakan memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas masyarakat, jasa transportasi darat, akomodasi, dan pelayanan umum. Aktivitas tersebut berpotensi menumbuhkan peluang kerja baru serta memperluas kegiatan ekonomi lokal. Pengelolaan Bandara Halu Oleo direncanakan terpisah dari Lanud Halu Oleo untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bandara lain yang juga ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Bandara Betoambari Baubau yang juga akan diuraikan sebagai berikut

Tabel 2. Data Pergerakan Penumpang dan Pesawat di Bandara Betoambari Baubau

Tahun	Lalu Lintas Pesawat Udara		Lalu Lintas Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2016	1265	1264	76,458	76,022
2017	2163	2161	123,325	119,006
2018	2479	2480	134,655	133,664
2019	1583	1588	86,152	86,710
2020	1084	1084	54,013	50,961
2021	1139	1138	51,415	52,249
2022	950	954	50,242	49,705
2023	792	792	43,800	39,937

Sumber: BPS Prov Sultra (2024)

Berdasarkan Tabel 2, pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Betoambari Baubau menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2016 hingga 2018. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Baubau. Sejak tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan jumlah penumpang dan lalu lintas pesawat sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas penerbangan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bandara.

Hasil observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Bandara Betoambari Baubau telah mengalami beberapa peningkatan penting. Panjang landasan pacu bertambah dari 1.800 meter menjadi 2.011 meter pada Oktober 2024, sehingga mampu melayani pesawat berukuran besar seperti Airbus. Pemerintah Kota Baubau juga menjalin kerja sama dengan maskapai Super Air Jet untuk membuka rute penerbangan Makassar–Baubau–Makassar sebanyak dua kali per minggu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung peningkatan layanan melalui hibah subsidi sebesar Rp1 miliar pada tahun 2025. Meskipun upaya pengembangan telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan yang perlu diselesaikan agar pengelolaan Bandara Betoambari dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya.

Bandara lain yang juga ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Bandara Matahoro Wakatobi yang juga akan diuraikan sebagai berikut

Tabel 3. Data Pergerakan Penumpang dan Pesawat di Bandara Matahoro Wakatobi

Tahun	Lalu Lintas Pesawat Udara		Lalu Lintas Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2016	424	425	21,403	22,597
2017	461	460	23,453	24,161
2018	566	566	29,901	30,684
2019	373	374	21,605	22,349
2020	278	279	12,787	13,365
2021	396	392	20,116	20,350
2022	212	210	7,176	7,217
2023	78	78	4,590	4,532

Sumber: BPS Prov Sultra (2024)

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka terlihat pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Matahoro Wakatobi menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2016 hingga 2018. Kenaikan ini menggambarkan adanya pertumbuhan aktivitas transportasi udara dan peningkatan konektivitas menuju wilayah pariwisata Wakatobi. Sejak tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan jumlah penerbangan dan penumpang akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut memengaruhi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Wakatobi. Penurunan volume penerbangan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat keterisian penumpang atau *load factor*, yang berdampak pada penghentian sementara beberapa rute penerbangan.

Hasil observasi dan dokumentasi di Bandara Matahoro Wakatobi menunjukkan berbagai langkah perbaikan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali konektivitas udara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan hibah subsidi senilai Rp500 juta pada tahun 2024 dan Rp1 miliar pada tahun 2025 guna mendukung keberlanjutan layanan penerbangan di bandara tersebut. Rute penerbangan Makassar–Wakatobi–Makassar telah diaktifkan kembali sejak Oktober 2024 melalui maskapai Super Air Jet. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan memperkuat sektor pariwisata yang menjadi andalan utama ekonomi daerah. Pengaktifan kembali rute penerbangan juga menjadi langkah penting dalam memperkuat aksesibilitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Wakatobi.

Hasil wawancara pada para informan penelitian meyakini bahwa pengembangan sarana transportasi udara sangat penting dalam memajukan daerah terutama pada beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi wisata yang sangat baik. Sekalipun

secara kewenangan bahwa pengelolaan transportasi udara, tentu sudah selayaknya dalam pengembangan Transportasi Udara juga harus melibatkan Pemerintah Daerah dari tingkat Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota sehingga pengelolaan transportasi udara dapat berjalan sangat baik dan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan transportasi udara sehingga terjadi konektivitas udara diantaranya :

Peran Sebagai Regulator

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting sebagai regulator dalam pengembangan sektor transportasi udara di wilayahnya. Peran ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan pengembangan bandara. Pemerintah Kota Baubau berperan aktif dalam proses pembebasan lahan Bandara Betoambari melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga area bandara dapat diperluas dan pelayanan transportasi udara semakin optimal. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan landasan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas udara di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan kebijakan pemberian hibah subsidi kepada beberapa bandara guna meningkatkan efektivitas layanan penerbangan. Bantuan senilai Rp500 juta pada tahun 2024 diberikan untuk Bandara Matahora Wakatobi, sedangkan pada tahun 2025 hibah senilai Rp1 miliar dialokasikan untuk Bandara Betoambari Baubau dan Bandara Matahora. Pemprov Sulawesi Tenggara turut mendukung pembebasan lahan untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Halu Oleo melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan pandangan Kusdian (2014), fungsi regulator yang dijalankan oleh pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan transportasi, termasuk transportasi udara, meskipun kewenangan utamanya berada di bawah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Peran sebagai Dinamisator

Peran sebagai dinamisator dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mendorong munculnya inisiatif, inovasi, dan dinamika dalam pengembangan sektor transportasi udara. Pemerintah berupaya menciptakan suasana kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat berlangsung secara efektif. Upaya ini mencerminkan fungsi pemerintah daerah sebagai penggerak yang mampu menumbuhkan semangat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, maupun sektor swasta.

Bentuk nyata dari peran dinamisator tersebut tampak pada dorongan pemerintah provinsi terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas bandara. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan PT Angkasa Pura dalam penyediaan terminal kargo di Bandara Halu Oleo. Kolaborasi ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas kapasitas pelayanan transportasi udara serta mendukung peningkatan arus barang dan penumpang. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Simamora et al. (2016) yang menegaskan bahwa pemerintah perlu mendorong sinergi antar pihak untuk mencapai tujuan pembangunan melalui inovasi dan kerja sama berkelanjutan.

Peran sebagai fasilitator

Peran sebagai fasilitator dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara menjembatani berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan transportasi udara. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif agar kebijakan dan program pengembangan bandara dapat terlaksana sesuai rencana. Pemerintah provinsi juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten atau kota, pihak maskapai, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan penyediaan layanan transportasi udara berjalan optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

Wujud nyata dari peran fasilitator ini terlihat pada kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan beberapa maskapai penerbangan seperti Pelita Air dan Super Air Jet di Bandara Halu

Oleo. Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan terhadap kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Pemerintah Kota Baubau dengan maskapai Super Air Jet untuk membuka serta memperluas rute penerbangan di wilayah tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Aslan et al. (2015) serta Epriad dan Harma (2020) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang mampu berfungsi secara optimal sebagai fasilitator berperan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran sebagai Katalisator

Hasil penelitian dari wawancara pada para informan penelitian juga menyatakan bahwa Pemda sudah berperan dalam mempercepat proses pengembangan Bandar Udara melalui dorongan kebijakan dan penciptaan iklim yang mendukung investasi dan pengembangan sektor transportasi udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Fauzi, 2015).



Gambar 2. Pemda Sulawesi Tenggara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Stakeholder Transportasi Udara

Sumber: Data Primer (2024)

Action plan yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kaitan peran sebagai katalisator seperti adanya koordinasi intensif dengan Kemenhub RI dalam pengembangan Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (baik peningkatan panjang runway di beberapa Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dukungan pihak swasta /maskapai penerbangan dalam membuka rute penerbangan di beberapa bandar udara di Provinsi Sulawesi Tenggara).

Temuan penelitian ini menegaskan perlunya dilakukan mekanisme *Collaborative Governance* dalam meningkatkan konektivitas udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Ansell & Gash, 2008; Noor, et al., 2022). Penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan transportasi udara termasuk dalam mendorong konektivitas transportasi udara dalam pengembangan ekonomi wilayah suatu daerah sebagaimana temuan penelitian yang telah ditemukan oleh (Suryani, 2020; Wicaksana, 2016; Gunawan & Medianto, 2016).

Jaringan bandar udara di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi daerah, dan konektivitas antarkabupaten/kota. Sebaran 17 kabupaten/kota dengan karakter geografis yang beragam menjadikan transportasi udara sebagai sarana vital yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir, kepulauan, dan daratan utama. Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2024) memperlihatkan bahwa pergerakan penumpang dan pesawat di beberapa bandara utama seperti Halu Oleo, Betoambari Baubau, dan Matahora Wakatobi mengalami fluktuasi signifikan. Meski sempat menurun akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020–2023, tren pergerakan kembali meningkat setelah adanya upaya pemulihan sektor transportasi udara melalui kebijakan subsidi dan penguatan konektivitas regional.

Bandar Udara Halu Oleo di Kendari menjadi simpul utama dalam jaringan transportasi udara Sulawesi Tenggara. Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan adanya rencana pengembangan bandara melalui perpanjangan landasan pacu menjadi 3.100 meter sebagai prasyarat menuju status Bandara Internasional dan Embarkasi Haji. Rencana tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong bandara ini tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai katalis ekonomi wilayah. Dampaknya diproyeksikan pada peningkatan aktivitas perdagangan, transportasi

darat, perhotelan, serta penciptaan lapangan kerja baru. Peran aktif pemerintah provinsi dalam memfasilitasi pembebasan lahan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait menunjukkan implementasi nyata fungsi regulator dalam pengembangan infrastruktur publik strategis (Tittle, et al., 2013).

Bandara Betoambari Baubau memperlihatkan dinamika pengembangan yang mencerminkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Peningkatan panjang runway dari 1.800 menjadi 2.011 meter serta kerja sama dengan maskapai Super Air Jet pada tahun 2024 menjadi tonggak penting yang membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Hibah subsidi transportasi udara sebesar Rp1 miliar dari pemerintah provinsi pada tahun 2025 memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung konektivitas udara antarwilayah. Hambatan terkait pembebasan lahan masih menjadi isu krusial yang memerlukan sinergi lintas sektor agar pengembangan infrastruktur berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek sosial masyarakat terdampak (Breidenbach, 2020).

Bandara Matahora Wakatobi menegaskan pentingnya transportasi udara sebagai instrumen utama pengembangan pariwisata daerah. Meskipun sempat mengalami penurunan trafik akibat pandemi, pengaktifan kembali rute Makassar–Wakatobi pada Oktober 2024 menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor pariwisata. Pemerintah provinsi telah memberikan dukungan subsidi hingga Rp1 miliar untuk menjamin keberlanjutan layanan penerbangan di bandara ini. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa ketersediaan konektivitas udara yang stabil sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan, perputaran ekonomi lokal, dan citra destinasi wisata nasional (Olimjonova, 2025).

Berdasarkan temuan di ketiga bandara tersebut, penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah memainkan empat peran utama dalam pengembangan transportasi udara sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan koordinasi lintas instansi, seperti dukungan pembebasan lahan dan pemberian subsidi operasional. Sebagai dinamisator, Pemda mendorong inovasi dan sinergi dengan pihak swasta, termasuk kerja sama pembangunan terminal kargo dengan PT Angkasa Pura. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan menjembatani kerja sama antara Pemkab Wakatobi dan Pemkot Baubau dengan maskapai penerbangan. Sementara sebagai katalisator, Pemda mempercepat proses pembangunan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta stakeholder terkait (loch, et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pengembangan transportasi udara regional. Pemda berperan sebagai regulator melalui kebijakan dan dukungan pembebasan lahan, sebagai dinamisator dengan mendorong inovasi dan kolaborasi dengan pihak swasta serta maskapai penerbangan, sebagai fasilitator dalam pemberian subsidi dan kerja sama antardaerah, serta sebagai katalisator yang mempercepat pengembangan bandara melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Peran-peran yang sudah dijalankan oleh Pemda Sulawesi Tenggara diantaranya adalah peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, peran sebagai fasilitator dan peran sebagai fungsi katalisator. Diperlukan penguatan kolaborasi antar-*stakeholder* agar pengelolaan transportasi udara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, S. A. (2012). *Perencanaan infrastruktur transportasi wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amsyal. (2024). *Analisis pengembangan prasarana airside Bandar Udara Betoambari Kota Baubau* (Thesis). Universitas Halu Oleo.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arsyad, L. O. M. N. (2021). *Kinerja layanan penumpang sebagai basis model pengembangan infrastruktur Bandar Udara Matahora dalam mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Wakatobi* (Dissertation). Universitas Halu Oleo.

- Aslan, M., Madani, M., & Aksa, N. (2015). Peran pemerintah dalam pengelolaan terminal di Terminal Regional Daya Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 198–209.
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi peran BKPM dalam meningkatkan investasi sektor infrastruktur strategis guna mendorong pemerataan pembangunan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 75–86.
- Bloch, J. H., Janko, K., Thessen, T., Jensen, O. B., & Lassen, C. (2021). Not all hubs are made equal: A case study of airport governance in Europe. *European Urban and Regional Studies*, 28(3), 241–262. <https://doi.org/10.1177/0969776421998727>
- Breidenbach, P. (2020). Ready for take-off? The economic effects of regional airport expansions in Germany. *Regional Studies*, 54(8), 1084–1097. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1659948>
- Epriadi, D., & Harma, U. (2020). Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan terminal di Kabupaten Tebo. *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v5i1.2416>
- Fauzi, A. (2015). *Competitive advantage industri penerbangan Malaysia terhadap pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market* (Thesis). Universitas Airlangga.
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Publik Administration*, 3(1), 32–40.
- Gunawan, G., & Medianto, R. (2016). Analisis konektivitas jaringan transportasi udara nasional. *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*, 8(2), 99–110. <https://doi.org/10.28989/angkasa.v8i2.123>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi pengembangan fungsi terminal penumpang tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Jinca, M. Y. (2009). Keterpaduan sistem jaringan antar moda transportasi di Pulau Sulawesi. *Jurnal Transportasi*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.26593/jt.v9i1.341>
- Karmila, Afifuddin, & Widodo, R. P. (2019). Peran pemerintah dalam menangani angkutan umum berbasis online: Studi di Kota Malang. *Respon Publik*, 8(1), 24–28.
- Kusdian, R. D. (2014). Kajian perusahaan bandar udara di Indonesia. In *Proceedings of the 17th FSTPT International Symposium* (pp. 1242–1251).
- Nadimi, N., Mansourifar, F., Shamsadini Lori, H., & Soltaninejad, M. (2024). How to outperform airport quality of service: Qualitative and quantitative data analysis extracted from airport passengers using grounded theory (GT) and structural equation modeling (SEM). *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering*, 48(1), 483–496. <https://doi.org/10.1007/s40996-023-01144-4>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance*. Yogyakarta: Penerbit Building.
- Olimjonova, S. M. Q. (2025). The impact of air transport and railway networks on tourism development. *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(7), 565–569. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/5890>
- Sani, Z. (2010). *Transportasi: Suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Simamora, R. K., Rudi, D., & Sinaga, S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 79–96.
- Suryani, I. (2020). *Studi pengembangan sisi bandara udara Kayuadi dalam menunjang pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Kabupaten Selayar* (Thesis). Universitas Hasanuddin.
- Tittle, D., McCarthy, P., & Xiao, Y. (2013). Airport runway capacity and economic development: A panel data analysis of metropolitan statistical areas. *Economic Development Quarterly*, 27(3), 230–239. <https://doi.org/10.1177/0891242412467228>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Wahyuni, R. S. (2018). *Peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi kasus lima rumah kost di Kelurahan Gunung Sari)* (Thesis). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wicaksana, B. P. (2016). *Perencanaan pengembangan sisi udara (air side) pada Bandar Udara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan* (Thesis). Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.